



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, didalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;

- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
  - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
  - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
  - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
  - g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
  - h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  - i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

## **2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem dalam melakukan pemungutan pajak menurut Resmi (2017) yaitu:

### *1. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan.

## 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

## 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya pajak daerah lebih banyak menganut sistem pemungutan pajak yang bersifat *Official Assessment* karena besaran pajak yang terutang akan sepenuhnya dihitung dan dipungut oleh aparat perpajakan.

## **2.3 Tarif Pajak**

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak untuk menghitung pajak terutang dikenal dengan 4 (empat) macam tarif, yaitu (Waluyo, 2016):

### 1. Tarif Pajak Proposional/Sebanding:

Tarif pajak proposional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

## 2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi menjadi beberapa tarif, sebagai berikut:

### a. Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

### b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

### c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

## 3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

## 4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Pajak kendaraan bermotor sendiri memiliki 2 (dua) jenis tarif pajak yang dikenakan yaitu tarif pajak proposional dan tarif pajak progresif:

### A. Tarif Pajak Proposional yang ditetapkan adalah:

- a. untuk kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,5%(satu koma lima persen);

- b. untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI sebesar 1% (satu persen);
  - c. untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- B. Tarif pajak progresif yang ditetapkan adalah:
- a. untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
  - b. untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - c. untuk kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
  - d. untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Jika dilihat dari jenisnya, tarif progresif yang dimiliki oleh pajak kendaraan bermotor adalah Tarif Progresif Tetap, hal ini dikarenakan kenaikan persentase pajaknya sama besar.

## **2.4 Ruang Lingkup Pemajakan**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Resmi, 2017).

### **1. Pajak Pusat (Negara)**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

## 2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

### **2.5 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana PAD dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat (Kusumawati dan Wiksuana, 2018). Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.



- A. Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- B. Retribusi Daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- C. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, meliputi:
  - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pemilik daerah/BUMD.
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pemilik negara/BUMN.
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pemilik swasta/kelompok.
- D. Pendapatan asli daerah lain yang sah, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang bertujuan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, selain itu bertujuan pula untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dilakukan melalui adanya dana perimbangan. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak (PBB, BPHTB, dan Pajak Penghasilan) dan sumber daya alam dengan ketentuan:

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah, dan 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat.
- b. Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah, dan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah Pusat.
- c. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen), yang kemudian dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40%

(empat puluh persen) untuk provinsi.

- d. Penerimaan dari sumber daya alam sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

### 3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang juga mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada Daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pengenaan pajak tidak hanya penghasilan yang didapat oleh wajib pajak, tetapi kepemilikan atas kendaraan juga akan dikenakan pajak, pajak yang dikenakan adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Selain mengatur tentang objek atas pajak kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur hal-hal yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa subjek dan wajib pajak dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pajak atas Kendaraan Bermotor dihitung dengan cara mengalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Jika Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
3. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
4. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
5. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor yang sama;
6. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
7. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Perhitungan dasar pengenaan pajak suatu Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan bobot kendaraan dengan menjadikan dasar faktor-faktor berikut:

1. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
2. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder dan ciri-ciri mesin 1.000 cc atau 2.000 cc.

Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatur mengenai tarif pajak Kendaraan yaitu:

1. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Walaupun sudah ditetapkan tarif atas pajak kendaraan bermotor, didalam pasal 6 ayat 5 dinyatakan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tarif pajak kendaraan bermotor yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tarif Tetap Pajak Kendaraan Bermotor:

- a. untuk kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI sebesar 1% (satu persen);
- c. untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2. Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor:

- a. untuk kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- c. untuk kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
- d. untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Dasar pengenaan tarif progresif ini masih sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama.

## **2.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah (Cahyadi dan Jati, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Cahyadi dan Jati (2016),

Kepatuhan wajib pajak adalah ukuran yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau kemauan dari wajib pajak yang melakukan semua kewajiban pajak dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Aswati *et al.*, (2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Cahyadi dan Jati, 2016). Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Aswati *et al.*, 2018).

Ada dua macam kepatuhan dalam penerapan kewajiban perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya membayarkan pajak tepat pada waktunya dan tidak menunggak pajak. Sedangkan, kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, misalnya mengisi dan melengkapi persyaratan pembayaran pajak (Nugraheni dan Purwanto, 2015) Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, yaitu: ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi, masyarakat kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) yang diakses pada 04 Februari 2020).



Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika banyak wajib pajak yang tidak patuh maka akan menghambat pemasukan negara dan pemerintah tidak dapat melakukan berbagai kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Cahyadi dan Jati, 2016). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Wardani dan Rumiya (2017) adalah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, memenuhi persyaratan dalam melakukan pembayaran pajak, dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku dan memenuhi persyaratan pembayaran pajak artinya wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menaati undang-undang yang mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor, ataupun sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Sedangkan tepat waktu yang dimaksud adalah saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sehingga pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang membuat wajib pajak tidak mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, memenuhi persyaratan pembayaran pajak, dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak, maka dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut tinggi.

## 2.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak adalah upaya atau tindakan yang disertai dengan dorongan dan kemauan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan (Jalil *et al.*, 2015 dalam Joseph dan Jacob, 2018). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Idealnya untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak harus diikuti dengan ajakan untuk mengetahui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Aswati *et al.*, 2018).

Menurut Kemala (2015), Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas, dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) kesadaran wajib pajak bisa diukur dengan menggunakan indikator yaitu kesadaran adanya hak dan kewajiban dibidang perpajakan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak,

kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

## **2.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Susilawati dan Budhiarta (2013) dalam Wardani dan Rumiyaun (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut Ilhamsyah *et al.*, (2016), apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya (Cahyadi dan Jati, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyaun (2017), Cahyadi dan Jati (2016), dan Ilhamsyah *et al.*, (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan

uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

**Ha<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.10 Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Carolina (2009) dalam Wardani dan Rumiya (2017) pengetahuan perpajakan adalah informasi yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Menurut Aswati *et al.*, (2018) pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Wajib pajak yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Ilhamsyah *et al.*, 2016). Pengetahuan yang buruk tentang pajak dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap kepatuhan (Mukhlis *et al.*, 2015 dalam Joseph dan Jacob, 2018). Penambahan pengetahuan mengenai perpajakan bisa didapatkan oleh wajib pajak melalui pendidikan formal ataupun non formal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pengetahuan yang diperoleh dari instansi pendidikan. Sedangkan,

non formal adalah pengetahuan yang diperoleh melalui televisi, majalah, pelatihan, seminar, dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan ketentuan perpajakan (Kowel *et al.*, 2019). Dimilikinya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak akan membantu wajib pajak itu sendiri dalam mengetahui ketentuan-ketentuan terkait perpajakan, lokasi pembayaran pajak, fungsi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan sistem pemungutan pajak yang digunakan. Hal-hal ini yang kemudian akan menilai kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang kemudian dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak (Ilhamsyah *et al.*, 2016).

## **2.11 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengetahuan mengenai perpajakan yang baik sangat diperlukan agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik untuk kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan negara (Aswati *et al.*, 2018). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005 dalam Ilhamsyah *et al.*, 2016). Menurut Kowel *et al.*, (2019) Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakan dan juga sanksi yang diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011 dalam Kemala, 2015). Menurut penelitian Kemala (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah *et al.*, (2016), Kowel *et al.*, (2019) dan Aswati *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

**Ha2: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.12 Kualitas Pelayanan**

Kualitas Pelayanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya (Paramatha dan Rasmini, 2016). Menurut Boediono (2006) dalam Sari dan Susanti (2015), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktifitas aparat perpajakan.

Menurut Mahardika (2015), Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan bagian Aparatur Sipil Negara untuk pemerintah daerah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, mengenai: Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.



7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain- lain.

Kesopanan dan sikap yang baik yang dimiliki petugas, pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti, penguasaan informasi, kecepatan penanganan masalah, kemudahan mendapat bimbingan atau arahan, petugas berpenampilan rapi, dan kenyamanan yang ditimbulkan dari fasilitas yang disediakan dijadikan sebagai indikator kualitas pelayanan menurut Dharma (2014) dalam Barus (2016).

## **2.13 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib**

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Paramatha dan Rasmini (2016), pelayanan yang diberikan secara baik, dapat menimbulkan sikap puas bagi wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerimaan pajak pun akan meningkat dari segi target maupun realisasinya. Menurut Supadmi (2009) dalam Paramatha dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan terus-menerus. Dengan adanya rasa puas atas pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) dan Ilhamsyah *et al.*, (2016), yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.*, (2017) dan Irianingsih (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

**Ha<sub>3</sub>: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib**

**Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.14 Kemudahan Pembayaran**

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah karena masih banyak wajib pajak yang merasa untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor prosesnya masih rumit dan memakan waktu yang lama, karena pajak kendaraan bermotor ini hanya bisa dibayarkan melalui kantor SAMSAT daerah setempat. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang merasa pada saat mereka ingin memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya tidak terlalu besar, mereka harus datang jauh ke kantor SAMSAT Induk yang tentunya menjadi kendala saat wajib pajak memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi SAMSAT Induk tersebut. Sehingga, diharapkan pemerintah daerah mampu membuat layanan yang memudahkan wajib pajak untuk mempermudah wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (<http://wartakota.tribunnews.com/yang> diakses pada 26 Februari 2019). Pengertian dari mudah itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan; tidak sukar; tidak berat; gampang. Kemudahan pembayaran didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya dan tidak menemukan kesulitan dalam melakukan pembayaran (Wulandari *et al.*, 2017). Menurut Nayoan (2016) Kemudahan membayar pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak mengalami kesulitan untuk menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudahan pembayaran pajak akan dirasakan oleh wajib pajak apabila sistem dan prosedur pembayaran mudah, dan lokasi tempat pembayaran pajak mudah untuk dijangkau.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah melakukan serangkaian inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan membuat SAMSAT Keliling dan Gerai SAMSAT. SAMSAT Keliling ini dibuat untuk memudahkan para wajib pajak untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT menyediakan layanan SAMSAT Keliling yang digunakan sebagai fasilitator untuk menjangkau wajib pajak yang bertempat tinggal cukup jauh dari SAMSAT Induk. Kemudahan pembayaran pajak melalui layanan ini bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Gerai SAMSAT merupakan layanan SAMSAT yang dibuka di pusat pertokoan atau pemukiman penduduk. Kemudahan menjangkau lokasi SAMSAT, adanya layanan SAMSAT untuk mempermudah pembayaran pajak, kemudahan pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, layanan SAMSAT yang dapat menjangkau lokasi yang cukup jauh dari SAMSAT Induk, dan prosedur yang mudah diikuti menjadi indikator dari kemudahan pembayaran. Dengan dibuatnya sistem SAMSAT Keliling dan Gerai SAMSAT ini diharapkan bisa menjadi solusi agar wajib pajak tidak lagi merasa direpotkan dengan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

## **2.15 Pengaruh Kemudahan Pembayaran Terhadap Kepatuhan**

### **Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kemudahan pembayaran melalui berbagai layanan, bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wulandari *et al.*, 2017), sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menaati undang-undang yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melengkapi persyaratan dalam membayar pajak dengan mudah dan selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sehingga akan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Hal ini berdampak akan adanya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian terhadap kemudahan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Wulandari *et al.*, (2017) dimana studi kasus ini dilakukan di Kantor SAMSAT Klaten yang menyatakan bahwa kemudahan pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha4: Kemudahan Pembayaran Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan**

**Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## 2.16 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Wulandari *et al.*, (2017) adalah alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Sanksi perpajakan diterapkan untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh dan mematuhi segala ketentuan perpajakan (Susmita dan Supadmi, 2016). Menurut Januar *et al.*, (2017) kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, karena sanksi ini merupakan hal yang penting dalam dunia perpajakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat dua jenis sanksi, yaitu:

### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu denda administrasi, bunga, dan kenaikan.

### 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi pidana, yaitu:

- a. Denda Pidana, Dalam sistem pengenaannya, denda pidana berbeda dengan denda administrasi. Denda administrasi akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan, denda

pidana akan dikenakan kepada wajib pajak dan juga akan diancamkan kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan atas tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

- b. Pidana Kurungan, Pidana kurungan hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran. Jenis pidana ini dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, maka ketentuan yang diancamkan akan sama dengan denda pidana. Yang membedakan adalah, dalam denda pidana pelaku harus menerima hukuman dengan membayarkan denda, sedangkan dalam pidana kurungan pelaku harus menerima kurungan di penjara.
- c. Pidana Penjara, Pidana penjara sama seperti dengan pidana kurungan, pidana penjara diancamkan kepada tindakan kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain terlambat dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan dan 25% (dua puluh lima persen) pertahun terhitung dari pokok pajak kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menurut Isyatir (2015) dalam Wardani dan Rumiyatun (2017) sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2015). Indikator yang digunakan untuk sanksi perpajakan yang digunakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) adalah wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor, penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Diterapkannya sanksi yang berat dan tegas diharapkan bisa membuat adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **2.17 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi perpajakan diterapkan untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh dan mematuhi segala ketentuan perpajakan (Susmita dan Supadmi, 2016). Menurut Nugroho (2006) dalam Susmita dan Supadmi (2016), sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material. Jika pemberian sanksi yang berat dan tegas tanpa toleransi ini telah dijalankan dengan benar kepada para



pelanggarnya, maka para wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya sehingga membuat terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011) dalam Ilhamsyah *et al.*, (2016) sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah *et al.*, (2016) dan Efriyenty (2019), menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyyatun (2017) dan Irianingsih (2015) menyatakan jika sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga, berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Ha5: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

## **2.18 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kemudahan Pembayaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah *et al.*, (2016) menunjukkan jika pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap secara simultan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.*, (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan razia lapangan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Kemala (2015) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan reformasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2.19 Model Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

